



PERUMUSAN HASIL ASSESSEMEN LAPANGAN KEDALAM KERANGKA MODEL STRATEGIS KADERISASI PEREMPUAN PARTAI POLITIK

Oleh:

I Wayan Gede Suacana

Kerjasama

**Partnership for Governance Reform (Kemitraan)
Institute for Peace and Democracy (IPD)**

2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan partai politik di Indonesia, berkat *affirmative action* yang diadvokasikan kepada pemerintah, akhirnya kuota 30% perempuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik berhasil dimasukkan. Sejak diterapkannya kuota 30% dalam pemilu 2004, jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif memang cukup memberikan nilai positif dengan meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di DPR dari hanya 9,00% pada pemilu 1999, meningkat menjadi 11,09% pada pemilu 2004, dan meningkat lagi menjadi 17,86% pada pemilu 2009. Namun dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik belum dijalankan secara sungguh – sungguh oleh Partai Politik. Berdasarkan data di website masing-masing Partai Politik, struktur kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat tahun 2005-2010 untuk 7 Partai Besar (Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP, Demokrat, dan PKS) belum ada yang mampu memenuhi perintah dari Undang-Undang tersebut, hal ini juga terjadi hampir diseluruh kepengurusan Partai Politik baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Kalaupun ada partai politik yang sudah merekrut 30% perempuan dalam partainya, misalnya PKS di Lombok, mereka ditempatkan pada posisi yang tidak strategis. Padahal kehadiran dan posisi perempuan di kepengurusan partai politik, sangat menentukan dalam penempatan calon perempuan dalam daftar calon.

Lemahnya sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak efektif, dan sanksi yang lemah dari pemerintah bagi partai yang tidak menjalankan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan merupakan beberapa dari sejumlah penyebab minimnya kepengurusan perempuan dalam partai itu sendiri. Untuk itu, diperlukan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan posisi perempuan di partai politik dan strategi untuk mendorong penguatan peran dan posisi perempuan di politik.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan umum

- Memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan posisi perempuan di partai politik dan strategi untuk mendorong penguatan peran dan posisi perempuan di politik.

1.2.2 Tujuan khusus

1. Mendalami laporan assessmen kaderisasi perempuan di partai politik
2. Mensimulasikan data hasil assessmen dengan kerangka model kaderisasi perempuan di partai politik
3. Merumuskan model strategis awal pengembangan kaderisasi perempuan di partai politik.

1.2.2 Keluaran

1. Pendalaman analisis laporan assessmen lapangan di Bali dan Lombok
2. Pemetaan data ke dalam kerangka model kaderisasi
3. Model awal pengembangan kaderisasi perempuan di partai politik

BAB II

ASSESEMEMEN KADERISASI PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK

2.1. KONDISI DI BALI

Assessment kaderisasi perempuan di parpol yang utama dilakukan dengan metode Focus Group Discussion/ FGD atau Diskusi Kelompok Terfokus terhadap 4 (empat) kelompok kader perempuan partai dan 4 (empat) kelompok pengurus partai. Partai yang menjadi target responden adalah PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat pada tiga kabupaten (Tabanan, Bangli dan Jembrana) serta Provinsi Bali. Ketiga partai ini dipilih dengan asumsi ketiganya merupakan partai yang memiliki legislatif terbanyak di Bali. Jumlah total responden pada kelompok kader perempuan adalah 32 orang dengan keseluruhan responden pada pengurus parpol sebanyak 22 orang.

Untuk lebih meyakinkan hasil dari FGD terhadap dua kelompok tersebut (Kader Perempuan dan Pengurus Parpol), assessment juga dilakukan terhadap 3 Pimpinan Parpol (PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat); Legislator laki-laki (4 orang) dan Legislator perempuan (4 orang). Assessment untuk ketiga kelompok tersebut dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan validitas dan realibilitas yang lebih baik.

Lebih lanjut lagi, assessment juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok non partai dengan maksud memantapkan hasil assessment kader perempuan partai dari kacamata luar partai. Oleh karena itu dipilih komponen masyarakat yang sedikit banyak bersinggungan dengan perempuan dalam kancah politik di Bali. Kelompok non partai yang dijadikan target responden adalah Kelompok Aktifis Perempuan Non Partai (9 orang) Kelompok LSM yang berkecimpung dalam Pemberdayaan Perempuan, (9 orang), kelompok Media (9 orang) Pakar (2 orang), Tokoh Adat (4 orang) dan Suami Legislator perempuan (4 orang). Assessment terhadap Tiga kelompok pertama dilakukan dengan FGD sedang yang lain dilakukan dengan wawancara terstruktur.

Hasil Assesment

Hasil assessment ini dapat digambarkan dalam 3 alur kategori, yaitu :

1. Masuknya wanita dalam politik, meliputi,
 - a. Faktor/alasan yang mendorong perempuan terjun dalam dunia politik
 - b. Pandangan terhadap keberadaan perempuan di ranah politik
 - c. Faktor/alasan yang menghambat perempuan aktif di dunia politik
2. Perempuan dalam partai politik, meliputi,
 - a. Bagaimana perempuan diposisikan dalam partai politik
 - b. Program kaderisasi dalam parpol
 - c. Perjuangan kesetaraan gender di legislatif
 - d. Efektivitas kebijakan Affirmatif
3. Keluarnya perempuan dari politik

2.1.1 Masuknya Perempuan dalam Politik

a. Alasan Yang Mendorong Perempuan Terjun Dalam Dunia Politik

Kader Perempuan

Hasil FGD yang dilakukan terhadap kelompok kader perempuan partai memperlihatkan bahwa sebagian besar kader perempuan parpol terjun ke dunia politik karena *hubungan kekerabatan* yang dimiliki. Dipengaruhi dan dibimbing oleh orang tua, diajak suami, dan karena berteman dengan aktivis/ elite partai adalah alasan kekerabatan yang mempengaruhi perempuan terjun di ranah politik.

"awalnya ikut partai karena suami, saya ingin tahu kegiatan suami di partai, Kegiatan saya sebelumnya di entertainment"

"masuk partai karena dapat dukungan yang sangat besar dari keluarga, terutama orang tua yang memang pengurus partai"

"masuk partai karena anak saya caleg tahun 2009 lalu, maka saya ingin belajar dulu di partai. Mudah-mudahan pemilu 2014 nanti bisa jadi caleg juga"

"Saya orang bisnis, tetapi karena ada sesepuh yang mengajak saya untuk terjun ke politik, maka saya mau"

"Awal masuk politik karena melihat teman yang aktif dipartai, desanya menjadi maju. Ketika sudah masuk, ternyata mengajukan anggaran untuk pembangunan desa lebih mudah melalui internal partai"

Alasan kedua berorientasi pada ***pengembangan kapasitas diri***, yang mana perempuan minat terjun dalam politik karena merasa bertambah wawasan, melatih dan mempraktekan komunikasi dan kemampuan berbicara, mencari teman, menemukan tantangan, membentuk pribadi yang kuat dan ingin mendobrak kerasnya politik laki-laki di Bali.

"Saya masuk partai untuk menambah wawasan, menambah banyak teman, pergaulan kita akan lebih luas. Kalau membutuhkan apa-apa, terutama yang dibutuhkan desa akan lebih mudah"

" Jiwa saya terpanggil, mendapat wawasan lebih, melatih kemampuan komunikasi, keluarga juga mendukung"

"Saya ingin membangun citra positif dimat masyarakat dahil saya, ingin menjadi perempuan yang mampu mendobrak kerasnya politik laki-laki di Bali"

Selanjutnya juga ditemukan pendapat dari kader yang berafiliasi pada alasan ***ekonomi***, yaitu membuat jaringan pertemanan, promosi usaha dan mengembangkan bisnis.

"Saya ingin mencari tantangan dipolitik sekaligus mengembangkan jaringan usaha"

"Membentuk pribadi yang kuat sekaligus menambah teman dan relasi bisnis saya"

Alasan terakhir mengapa perempuan tertarik dunia politik adalah untuk ***kekuasaan*** (senang memimpin, jadi legislatif, terlibat dalam pengambilan keputusan dan menikmati kekuasaan)

"Ada kepuasan batin karena terlibat dalam pengambilan kebijakan untuk publik"

Pengurus Parpol

Hal senada/ sama juga didapatkan dari FGD yang dilakukan terhadap kelompok Pengurus Parpol. Sebagian besar mengatakan bahwa perempuan memutuskan terjun menjadi kader partai, utamanya adalah ***hubungan kekerabatan*** yang ada. Sebagian lagi percaya bahwa perempuan menjadi tertarik politik karena tertarik dengan ***ajakan mereka*** sewaktu melakukan sosialisasi. Selain itu alasan yang berorientasi

pengembangan kapasitas diri dan ekonomi juga menjadi sebab lainnya. Sedangkan kelompok legislator perempuan menyatakan bahwa mereka masuk parpol karena punya motivasi yang kuat, ada peluang menjadi caleg, siap dan didukung suami.

b. Pandangan Terhadap Kiprah Perempuan Dalam Ranah Politik

Pengurus Parpol

Pandangan terhadap kiprah perempuan dalam ranah politik ini pada dasarnya dapat dibagi dalam dua pendapat, yaitu yang mendukung dan yang kurang mendukung.

Hasil FGD dengan Pengurus Parpol memperlihatkan bahwa sebagian dari mereka menyatakan dukungannya dan melihatnya sebagai hal yang positif. Kelompok ini berkeyakinan bahwa tanpa kehadiran kader perempuan di partai, kancah politik tidak lengkap. Kelebihan kader perempuan bagi mereka adalah lebih santun berpolitik, halus, lebih jujur, bertanggung jawab, teliti di anggaran, bisa mendinginkan suasana yang panas akibat perdebatan yang terjadi di partai dan relatif lebih teliti dibandingkan dengan laki-laki. Kader perempuan memiliki arti strategis dan sinergis dengan kader laki-laki seperti tangan kiri dan kanan, saling membantu dan berkedudukan sama. Tidak ada kader perempuan politik jadi anarkis.

"Kalau bicara kemauan dan tanggung jawab, saya lebih apresiasi terhadap kader perempuan. Kepanitiaan yang dipimpin oleh perempuan, selalu on-time"

"Peran perempuan di partai untuk mendinginkan suasana yang panas. Sosok perempuan lebih halus cara menyampaikan masukan atau menengahi permasalahan, jadi kami malu kalau ribut ada perempuan"

"Perempuan memiliki arti strategis dan sinergis dengan laki-laki, seperti tangan kanan dan kiri. Dalam kehidupan saling membantu dan berkedudukan sama"

Ketika diminta pendapatnya lebih jauh apakah makin bertambahnya kader perempuan di partai langsung mempengaruhi perolehan suara partai pada pemilu/pilkadal, tidak semua menyetujuinya. Artinya, mereka yang mendukung dan melihat kehadiran kader perempuan dalam kancah politik positif, belum melihat korelasi antara kehadiran kader perempuan dengan meningkatnya perolehan suara partai.

Sementara itu sebagian lagi dari pengurus parpol kurang mendukung dan belum melihat kehadiran perempuan dalam politik sebagai hal yang positif. Kelompok ini beranggapan bahwa kapasitas kader perempuan yang kurang bagus, hanya sebagai pelengkap strukture, jadi tetap dikesampingkan dalam urusan-urusan politik.

"Perempuan disanjung diawal, setelah masuk lalu dibanting"

" Perempuan, terutama dikabupaten tidak tahu persis politik, kemampuan rendah. Tetapi justru sekarang ini perempuan tertarik masuk partai disaat susah cari kerja, jadi hanya untuk mencari kerja saja"

"Perempuan mau berpolitik? Percuma kita diskusi kalau ternyata mereka tidak punya kualitas dan kemampuan yang bagus.. karena hanya yang memiliki kompetensi bagus yang bisa memikirkan masalah masyarakat"

Suami Legislator Perempuan

Pandangan yang mendukung terhadap kiprah perempuan dalam politik juga didapat dari kelompok responden suami legislator serta pimpinan partai politik. Suami legislator berpendapat bahwa adanya perempuan dalam politik akan memudahkan untuk mengajak perempuan-perempuan lain menjadi kader, aspiratif terhadap kebutuhan perempuan. Kader perempuan dalam partai jelas berpengaruh langsung terhadap suara perempuan dalam pemilu.

Pimpinan Parpol

Sementara dari pimpinan parpol juga menyatakan dukungannya terhadap kiprah perempuan diparpol, tetapi tidak semua pimpinan partai beranggapan bahwa kader perempuan partai memiliki pengaruh langsung terhadap perolehan suara partai pada pemilu.

Kelompok Non Parpol

Kiprah perempuan dalam politik dilihat oleh kalangan Media, Aktifis perempuan non partai dan LSM yang berkecimpung dalam pemberdayaan perempuan sebagai hal yang belum positif. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kiprah perempuan dalam politik lebih sebagai pelengkap, hiasan, obyek, lebih menonjolkan seksualitas,

kurang peka dan hanya dipakai sebagai *vote getter* saja menjelang pemilu. Tidak ada hubungan yang signifikan antara bertambahnya jumlah kader perempuan dengan meningkatnya suara pemilih perempuan.

c. Faktor yang Menghambat Perempuan di Politik

Kader Perempuan

Hampir semua responden kelompok kader perempuan sepakat bahwa faktor utama yang menjadi kendala/penghalang perempuan untuk terjun dalam politik adalah **suami**. Ijin suami, takut pada suami, suami tidak rela istrinya sering pulang malam merupakan hal yang utama dan pertimbangan pertama untuk para perempuan terjun dalam dunia politik. 99% pintu masuk utama perempuan untuk aktif dipangung politik adalah ijin suami. Jarang sekali suami memberi ijin istri untuk terlibat aktif dipolitik kecuali dia juga seorang politikus/pengurus partai pada partai yang sama.

"Suami menghambat karier istri dipolitik dengan memberi ancaman cerai"

"99% suami tidak mendukung istrinya berpolitik, walaupun mendukung hanya dimulut saja, tidak disuasana riil/fakta"

"Faktor perempuan berpolitik adalah adanya ijin dari suami. Tanpa ijin suami tidak akan jalan semuanya, termasuk pada perempuan yang sudah mandiri secara ekonomi. Ijin suami tetap paling pokok"

Suami sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perempuan yang terjun di panggung politik ini juga dipersepsi sama oleh kelompok pengurus partai, pimpinan parpol dan kelompok legislator perempuan. Para legislator perempuan umumnya mendapat dukungan penuh dan total dari para suami baik pada saat menjadi kader partai, masa pencalonan ataupun setelah duduk di legislatif.

Selain suami, faktor yang dipersepsi oleh kader perempuan sebagai hal yang kurang mendukung pemberdayaan kader perempuan partai adalah **pelaku media**. Sebagian besar kader perempuan berpendapat (dan berpesan kepada teman-teman media) bahwa pelaku media tidak terlalu bersahabat dengan kader perempuan dalam pemberitaannya. Masih terasa ada perbedaan dalam memperlakukan kader perempuan dengan kader laki-laki diparpol dalam pemberitaannya. Berita yang dimuat jarang yang berisi

kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak terhadap pemberdayaan perempuan parpol. Media lebih menyukai hal yang kontroversial, konflik, kekerasan yang mana jauh dari kepentingan perempuan. Media juga sering harus mengkonfirmasi wawancara yang dilakukan dengan kader perempuan kepada pimpinan /pengurus partai yang adalah laki-laki. Strategi jurnalisme advertorial yang membutuhkan biaya juga dipersepsi tidak mendukung kegiatan perempuan partai.

Kelompok pelaku media dalam FGD mengkonfirmasi dan menyepakati hal tersebut. Menurut kelompok media strategi pemasaran media adalah harus disenangi oleh pembaca dan layak jual dimasyarakat. Komentar-komentar dari kader perempuan kurang meledak, tidak vokal, dingin dan wawasannya harus diakui tidak sebaik kader laki-laki untuk menanggapi permasalahan yang sama, Oleh karena itu kader wanita harus mesti melakukan terobosan terobosan yang populer agar dilirikmoleh media.

Hal menarik yang berkaitan dengan hambatan perempuan untuk berkiprah dipanggung politik adalah faktor adat budaya. Budaya patrilineal, konsep purusa pradana yang sering dipersepsi oleh banyak orang sebagai hambatan jika perempuan terjun didunia yang biasanya dimonopoli oleh laki-laki ternyata tidak mutlak benar.

Sebagian besar dari kelompok kader perempuan berpendapat bahwa kalangan adat tidak menghalangi kader wanita terjun dalam dunia politik, paling tidak sudah membuka pintu, walaupun tidak bisa dikatakan mendorong. Dalam mendukung caleg-caleg yang maju didesa akan melihat kualitas dari caleg, tetapi diakui oleh kader biasanya tetap lebih condong ke laki laki.

Hambatan adat terhadap kiprah perempuan didunia politik ini kemudian dimaknai oleh kader perempuan sebagai beban kerja adat yang menjadi kewajiban dari wanita di Bali. Kerja adat yang pada saat-saat tertentu memang menyita waktu, menjalankan peran domestik kader dirumah tangga, pengembangan karier profesionalnya dan kegiatan kader di parpol, mengharuskan kader perempuan partai di Bali harus bisa manage waktu demikian rupa supaya semua berjalan baik. Padahal untuk menjadi kader partai yang profesional dan layak masuk nominasi caleg, kader harus aktif dalam kegiatan-kegiatan partai, yang menyita waktu.

Dapat dikatakan disini bahwa adat dipandang sebagai penghambat dalam arti waktu yang harus diluangkan oleh kader perempuan dalam melaksanakan kewajibannya mebanjar, tidak secara substantif menghambat perempuan untuk berkiprah dipolitik.

2.1.2 Perempuan dalam Partai Politik

a. Kader Perempuan Diposisikan di Partai

Pimpinan partai politik yang diwawancara menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan pada kebijaksanaan partai dalam menempatkan kader-kadernya, baik perempuan atau laki-laki. Semua diperlakukan sama sesuai dengan bidang dan kapasitas kader. Jabatan atau posisi kader perempuan dipartai disesuaikan dengan pemilihan pengurus masing-masing DPD II atau DPC. Dan sudah ada penekanan atau arahan dari pimpinan harus ada keterwakilan perempuan. Posisi jabatan untuk kader perempuan menurut mereka bisa apa dan dimana saja. Ada posisi ketua komisi DPRD yang diembankan kepada kader perempuannya, Sekretaris Partai ditingkat DPD I, Wakil Ketua, ketua Bidang dan lainnya

Sementara itu kelompok kader perempuan berpendapat yang agak berbeda. Menurut mereka kebijaksanaan partai dalam memposisikan mereka dipartai tidak membuat atau mendorong mereka bisa berperan lebih aktif dipolitik. Kader perempuan partai menurut mereka seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang strategis seperti bendahara, sekretariat, wakil bidang pemberdayaan perempuan dan seksi konsumsi dalam kegiatan partai.

Hal sama dikemukakan oleh komponen non parpol (Media, LSM dan Aktifis Perempuan), yang menyatakan bahwa kader perempuan partai biasanya diposisikan di jabatan yang stereotipnya feminim seperti di bendahara, litbang pemberdayaan wanita, konsumsi.

b. Program Kaderisasi dalam Parpol

Pimpinan Parpol dan Legislator

Pimpinan partai politik yang diwawancara menyatakan bahwa sudah ada pengkaderan dalam partai yang dilakukan secara berjenjang. Pengkaderan dilakukan secara umum baik untuk kader laki-laki maupun kader perempuan, tidak ada perbedaannya.

Hal yang sama diungkapkan juga oleh sebagian besar kelompok legislator laki-laki dan kelompok legislator perempuan, bahwa secara umum ada pengkaderan di partai yang dilakukan secara berjenjang.

Ketika pimpinan parpol maupun kelompok legislator partai ditanya tentang pola atau bentuk serta jenjang pengkaderan, sebagian besar menyatakan bahwa pengkaderan partai dilakukan dengan mengirim para kader mengikuti pelatihan/ workshop/ training atau diskusi tentang perkembangan politik yang biasanya dilakukan oleh pihak luar partai, dalam hal ini LSM yang koncern dalam bidang transformasi parpol (Selalu disebut IRI). Selain itu juga ada pembekalan yang dilakukan oleh DPP, Pembekalan ini dilakukan secara rutin dan berkala oleh partai tertentu, sedangkan untuk partai lain menyatakan bahwa pembekalan yang dilaksanakan DPP untuk kader perempuan berdasarkan kuota (biasanya dikirim 2 orang), dan sekarang sudah tidak pernah lagi.

Kader Perempuan

Sementara itu, kelompok kader perempuan partai, sebagian besar menyatakan bahwa pengkaderan di partai memang sudah ada tetapi kurang dianggap penting dan tidak diseriusi oleh partai. Bentuk pengkaderan menurut mereka, selain dikirim pada event-event tertentu seperti pelatihan/ training/ workshop atau diskusi juga event yang diadakan oleh internal partai, seperti:

- Arahan dan penyuluhan dari pengurus/ elite partai
- Diskusi sehari-hari tentang politik dan kemungkinan pencalegan

- Memberdayakan program-program ketrampilan wanita seperti kelompok pengayuh banten, kelompok tani perempuan, koperasi perempuan, arisan, donor darah, pasar murah.
- Diklat yang dilakukan oleh DPP untuk forum pemberdayaan perempuan
- Diklat yang dilakukan oleh organisasi perempuan partai dengan materi sejarah berdirinya partai, ideologi partai dan sosbudhankam

Menurut sebagian dari kader perempuan partai , jenjang –jenjang pengkaderan diawali dari menjadi anggota sayap partai atau anak ranting, berlanjut menjadi pengurus partai dan kemudian diajukan sebagai caleg dari partai. Setiap jenjang dinilai dari kontribusi kader/ aktifitas kader mengikuti kegiatan-kegiatan partai, tidak bisa langsung naik menjadi caleg tanpa mengikuti proses.

Kader perempuan yang lain berpendapat lain mengenai jenjang pengkaderan dipartai. Mereka berpendapat tidak dikenal adanya jenjang dalam pengkaderan dipartai, terbukti dalam banyak kasus adal caleg perempuan yang tiba tiba muncul sebagai caleg partai tanpa pernah aktif menjadi kader apalagi menjadi pengurus partai. Beberapa kader bahkan merasa kecewa dan sakit hati karena mereka sudah memupuk aktifitas sejak adri anak ranting, aktif dalam setiap kegiatan partai dan merasa sudah memiliki modal sosial untuk menjaring suara didapil tertentu, ternyata jatuh pada kader yang tak pernah aktif.

Kelompok non Parpol

Pengkaderan dipartai ini dilihat oleh kelompok diluar partai (Media, Aktifis Perempuan, Pakar dan LSM) sebagai berikut:

Pengkaderan Dalam partai politik wajib ada dan memang ada tetapi tidak terlihat aktif dilakukan oleh partai. Hal ini memperlihatkan belum ada pengkaderan yang dilakukan oleh partai secara serius, memiliki pola, berjenjang baku dan terjadwal secara rutin. Apalagi untuk pengkaderan khusus perempuan partai. Partai belum menyadari peran strategis dari kader perempuan. Kaderisasi dipartai biasanya aktif dilakukan insidental saja, hanya menjelang pemilu dan tergantung kepentingan sesaat. Partai belum memiliki visi untuk jangka panjang dengan tidak diseriusnya pengkaderan dipartai.

c. Perjuangan Kesenjangan Gender di Legislatif

Kader Perempuan

Sebagian besar kelompok kader perempuan partai berpendapat bahwa belum ada, belum merasakan, belum melihat perjuangan dari legislator perempuan partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat perempuan yang ada. Para legislator baru memikirkan kepentingan partai dan diri sendiri. Kader juga berpersepsi bahwa legislator perempuan lupa pada konstituen yang memilihnya dulu, kalau bertemu bahkan tidak menyapa, tampak takut kalau diminta sumbangan, tidak aktif lagi pada kegiatan-kegiatan sosial, tidak pernah turun kebawah. Ditambah lagi dengan kapasitas diri yang rendah, bagaimana legislator perempuan akan menyuarakan aspirasi suara wanita. Walau demikian, sebagian kecil dari kelompok ini berpendapat bahwa ada satu-dua legislator perempuan yang cukup mumpuni, sudah berusaha untuk memperjuangkan kebijaksanaan kesetaraan gender tetapi selalu mentok karena tidak dapat dukungan, terutama dari politisi senior.

Legislator Perempuan

Issue yang sama pada kelompok legislator perempuan berpendapat bahwa mereka telah memperjuangkan aspirasi perempuan di DPR dengan cara melakukan pelatihan dan advokasi, merangkul anggota lain untuk ikut memperjuangkan kebijaksanaan kesetaraan gender dan selalu konsultasi dan koordinasi dengan sesama anggota legislator perempuan.

d. Dampak Kebijakan Afirmatif Bagi Partai

Kader Perempuan

Sebagian besar kader partai berpendapat bahwa kebijakan afirmatif efektif dan berdampak langsung terhadap pemberdayaan kader perempuan di partai. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, jumlah caleg perempuan 'dikontrol' naik dan nyatanya jumlah legislator perempuan yang terpilih juga meningkat. Menurut kelompok ini kebijakan afirmatif perlu dikembangkan lagi dalam penerapannya. Aturan ini perlu

diterapkan untuk paling tidak quota 30% untuk pengurus partai dan sanksi bagi parpol yang tidak mematuhi. Dengan demikian kader perempuan memiliki kesempatan lebih besar lagi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis partai dan pada akhirnya memiliki harapan lebih baik lagi untuk pengembangan diri.

Sebagian kader yang lain berpendapat bahwa kebijakan afirmatif ini belum efektif bagi kader perempuan partai dan perlu dikembangkan lebih jauh serta harus ada sanksi yang tegas bagi partai yang tidak mematuhi.

Mereka berpendapat tidak efektif karena kebijakan itu baru setengah hati. Dukungan riil dari partai dan kader laki-laki untuk memberi kesempatan terhadap kader perempuan maju kedepan sangat dibutuhkan (ada resistensi internal). Kebijakan pemilu lainnya, tarung bebas, juga tidak signifikan dengan quota 30% perempuan, karena biar diberi 50% pun kader perempuan akan kalah bersaing dengan kader laki-laki pada pemilu, kecuali ada kekuatan tertentu yang bermain untuk meloloskan kader perempuan tertentu. Menurut mereka sanksi yang tepat diberikan pada parpol yang tidak mengakomodasi kebijakan afirmatif adalah tidak diperkenankan untuk ikut pemilu.

Pimpinan Parpol

Sementara itu pimpinan parpol berpendapat bahwa kebijakan afirmatif adalah hal yang biasa, karena di partai mereka sudah menerapkannya sebelum ada kebijakan tersebut. Sudah banyak kader perempuan di partai dan sudah banyak pula menduduki jabatan pengurus parpol. Tidak perlu sanksi yang berlebihan, cukup sanksi moral saja.

Kelompok non Parpol

Sedangkan kelompok non parpol berpendapat bahwa kebijakan afirmatif ini kurang efektif dan masih mengambang. Hal tersebut diakibatkan karena dalam penerapannya asal comot saja, yang penting terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan, sehingga kader perempuan yang dikedepankan sebagai caleg terlalu dipaksakan tanpa kualitas yang memadai. Dampaknya, justru memprihatinkan bagi pencitraan kader perempuan. Persepsi masyarakat akan terbentuk bahwa caleg perempuan tidak berkualitas, tanpa modal sosial jelas dan negatif.

Kelompok ini juga setuju bahwa kebijakan afirmatif ini hanya kebijakan sesaat, jangka pendek dan sebatas anjuran saja karena tidak diaturnya pasal bagi partai yang tidak menerapkannya.

2.1.3 Keluarnya Kader Perempuan dari Ranah Politik

Kader Perempuan partai yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai politik, lepas dari panggung politik beralasan bahwa partai belum dapat mengakomodasikan idealisme yang mereka bawa dan juga diperlukan modal besar dalam berpolitik dan tidak sepadan antara hasil dengan yang mereka keluarkan.

“Sulit berjuang hanya bermodal idealisme, walaupun sangat saya inginkan. Lebih nyaman dengan profesi saya sekarang ini, sebagai wirausaha. Politik praktis modalnya besar dan hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan yang kita keluarkan”

“Masih ada permasalahan di partai, ada idealisme saya yang masih terabaikan dari visi misi partai”

2.2. KONDISI DI LOMBOK

2.2.1 Masuknya Perempuan dalam Politik

a. Faktor-faktor atau alasan apa yang mendorong perempuan masuk ke politik

Responden legislator perempuan menyebutkan bahwa motivasi perempuan untuk masuk ke dalam partai politik sebagian besar karena faktor suami/ayah/keluarga. Suami atau ayah mereka adalah tokoh dalam masyarakat dan mendorong perempuan untuk masuk ke dalam partai politik dan menjadi calon anggota legislatif. Faktor lain yang disebutkan adalah untuk mengetahui persoalan masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, ingin menjadi anggota legislatif, dan mencoba-coba/mencari pengalaman.

Dari sudut pandang aktivis perempuan parpol yang bukan anggota dewan, faktor terbesar yang mendorong perempuan masuk dalam partai politik adalah untuk memberdayakan/membela perempuan. Faktor kedua yang disebutkan adalah dorongan dari suami/ayah/keluarga. Faktor ketiga adalah motivasi untuk menunjukkan eksistensi perempuan. Politisi perempuan masuk ke dalam partai politik untuk menunjukkan bahwa politisi perempuan juga memiliki kapasitas seperti halnya politisi laki-laki. Faktor lainnya yang mendorong perempuan masuk ke parpol adalah untuk menyuarakan aspirasi rakyat, berpolitik adalah komitmen pada kemajuan, ajakan teman, dan ikut-ikutan ke parpol.

Kalangan non-parpol yang meliputi LSM, pakar, tokoh agama/adat, dan media massa, menyebutkan faktor dominan yang mendorong perempuan masuk ke parpol adalah karena suami/ayah/keluarga. Ketertarikan mereka untuk masuk parpol karena suami atau ayah mereka yang sudah berkiprah terlebih dahulu di parpol. Faktor lainnya yang disebut oleh kalangan ini adalah prestise/status sosial, melakukan perubahan, ajakan teman, memberdayakan/membela perempuan, menyuarakan aspirasi rakyat, memberikan pembelajaran politik bagi rakyat bahwa perempuan berani untuk terjun dalam politik.

- a. Pandangan tentang keberadaan perempuan di ranah politik. (Mendukung, Tidak Mendukung; Mendukung dengan Syarat)

Responden politisi laki-laki, baik yang legislator maupun pengurus partai, mendukung keberadaan perempuan dalam politik dengan alasan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam partai politik. Semua responden dari kalangan suami dari politisi perempuan mendukung perempuan dalam partai politik dengan syarat tidak mengabaikan urusan rumah tangga. Kalangan non-parpol yang meliputi aktivis LSM, media, dan tokoh adat/agama, memiliki sikap yang bervariasi mengenai keberadaan perempuan dalam politik. Sebagian besar di antara mereka mendukung keberadaan perempuan dalam politik dengan syarat. Syarat yang paling sering disebutkan adalah kapasitas dari politisi perempuan. Syarat lain yang disebutkan adalah kesepakatan bersama di kalangan internal partai, punya peluang dan massa, mentaati etika sebagai perempuan, dan memiliki loyalitas. Beberapa responden mendukung keberadaan perempuan dalam politik tanpa memberikan syarat. Satu orang responden mengartikan bentuk dukungan kepada perempuan dalam politik dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, namun tidak akan memilih kandidat perempuan. Dan satu orang responden tidak mendukung keberadaan perempuan dalam politik dengan menurutnya perempuan harus kembali pada fungsinya untuk mengurus rumah tangga.

- a. Faktor-faktor apa yang mempermudah perempuan aktif dalam politik.

Menurut responden dari kalangan politisi perempuan, faktor dominan yang mempermudah perempuan untuk aktif dalam politik adalah dukungan dari suami atau keluarga. Faktor lain yang disebut adalah memiliki pemilih pada pemilu sebelumnya, memiliki massa sebelum masuk partai, kader laki-laki yang tidak mempermasalahkan keberadaan perempuan dalam parpol, tidak dihalangi oleh keluarga dan lingkungan serta adat yang mendukung.

Dari kalangan non-parpol faktor utama yang mempermudah keaktifan perempuan dalam politik adalah ijin/restu dari suami. Faktor berikutnya yang beberapa kali disebutkan adalah suami yang punya ketokohan/kekuasaan/massa dan suami yang bekerja/dukungan finansial dari suami. Faktor lainnya adalah kedekatan dengan pengurus partai, penerimaan dari masyarakat terhadap pemimpin perempuan, dukungan dari Tuan Guru/Kiyayi, keluarga dari tokoh, dan mendapat pendidikan politik dari keluarga yang punya tokoh.

b. Faktor-faktor apa yang menghambat perempuan aktif dalam politik?

Kalangan politisi perempuan sebagian besar menyebutkan faktor kekhawatiran terhadap pemilu perempuan yang tidak memilih/tidak percaya terhadap caleg perempuan sebagai penghambat keaktifan perempuan dalam parpol. Beberapa responden menyebut faktor penghambat yaitu suami/keluarga yang belum mendukung, faktor finansial, terbebani dengan pandangan yang meremehkan perempuan, dan kader laki-laki yang merasa tersaingin dan tidak nyaman. Faktor penghambat lain yang juga disebut adalah sulit meninggalkan peran/tanggung jawab domestik, motivasi yang setengah-setengah, tugas/waktu pada keluarga, mobilitas di malam hari, dan tidak ada tindak lanjut dalam kaderisasi.

Kelompok non-parpol mengidentifikasi hambatan bagi keaktifan perempuan dalam politik yaitu faktor finansial, mobilitas di malam hari, pendidikan/wawasan/kesadaran politik yang kurang, dan pandangan bahwa istri harus taat pada suami. Faktor-faktor yang juga disebutkan oleh beberapa responden adalah ketidakpercayaan diri dari politisi perempuan, minat yang rendah dalam politik, pengaruh adat, dan pandangan bahwa politik itu kotor. Faktor-faktor lainnya adalah beban domestik yang banyak menyita waktu, kurangnya pengalaman menjadi pemimpin komunitas pada tingkat bawah, persaingan yang tidak sehat antar perempuan dalam pencalegan, pandangan bahwa perempuan hanya mengurus urusan domestik, kurang percaya dirinya kaum perempuan dengan kapasitas dirinya, ada simpati yang menurun, bergantung pada peran/figur suami, dan budaya bahwa politisi laki-laki lebih unggul.

2.2.2 Perempuan dalam Partai Politik

a. Penempatan perempuan dalam parpol.

Politisi perempuan yang ditanya mengenai hal ini memberikan jawaban yang bervariasi. Responden memberikan jawaban yang bervariasi. Jawaban dominan yang muncul adalah anggapan bahwa perempuan di parpol ditempatkan sebagai pelengkap. Jawaban kedua yang paling banyak adalah penempatan perempuan di parpol dilakukan melalui wadah organisasi yang membidangi masalah perempuan. Dalam kepengurusan partai khususnya di kepengurusan wilayah, perempuan cenderung tidak menempati struktur atau posisi strategis. Walaupun mereka ditempatkan dalam struktur, mereka menempati di bidang konsumsi atau di bidang kewanitaan. Jawaban lainnya yang muncul adalah kader perempuan yang senior bisa menempati semua bidang. Ada juga yang menyebutkan partainya memberikan ruang yang terbuka untuk jenjang kader di partai. Sebaliknya ada beberapa responden yang menyampaikan kurangnya dukungan yang didapatkan oleh kader perempuan di tubuh partai dan sulitnya jenjang karir bagi perempuan partai.

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan di tubuh partai belum mengarah pada bentuk penyadaran gender dan peningkatan kapasitas sebagai pemimpin yang mewakili suara perempuan. Bentuk pelibatan kader perempuan lebih cenderung mengarah pada membantu kegiatan partai, menginformasikan kegiatan partai, atau penempatan perempuan pada bagian tertentu di kepengurusan partai. Kalangan non-parpol melihat keterlibatan perempuan dalam parpol hanya sebagai pelengkap dan parpol dilihat kurang memberikan kepercayaan pada perempuan.

b. Ideologi Pengarusutamaan Gender dalam Parpol

Sebagian besar dari politisi perempuan yang diwawancarai mengenai pengarusutamaan gender mengatakan bahwa partai belum memiliki ideologi pengarusutamaan gender. Hal ini tampak dari pernyataan responden politisi perempuan yang mengatakan bahwa partai belum menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kader perempuan. Partai juga belum membuat kebijakan afirmatif di kalangan internal partai. Responden politisi perempuan juga mengatakan bahwa ketiadaan

pengarusutamaan gender dalam tubuh parpol diakibatkan karena isu gender yang kurang mendapatkan dukungan dari pimpinan partai.

Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh politisi perempuan, tampak bahwa meskipun ada usaha untuk menggalang partisipasi kader perempuan, upaya tersebut terbatas pada kehadiran perempuan pada rapat-rapat partai. Penggalangan partisipasi dari kader perempuannya lainnya yang nampak adalah penempatan kader perempuan pada posisi-posisi tertentu, namun secara umum belum ada langkah untuk mengarah pada kebijakan partai yang mencerminkan pengarusutamaan gender dalam tubuh parpol.

c. Efektivitas Kebijakan Afirmatif

Sebagian besar responden politisi perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa kebijakan afirmatif yang mendorong partai untuk mencalonkan setidaknya 30 persen caleg perempuan, belumlah efektif. Sebagian besar alasannya adalah karena kebijakan afirmatif ini tidak memberikan sanksi bagi partai yang tidak menerapkan kebijakan afirmatif. Alasannya lainnya adalah kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak memperkecil peluang bagi kandidat perempuan untuk terpilih. Sistem nomor urut zig zag lebih memperbesar peluang caleg perempuan untuk terpilih.

Secara substantif, kebijakan afirmatif tersebut belum berjalan dengan efektif. Salah seorang responden mengungkapkan bahwa meskipun jumlah caleg perempuan bertambah namun penambahan caleg tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan 30 persen caleg perempuan namun tanpa diikuti oleh peningkatan kapasitas atau pemberdayaan. Dengan kata lain partai belum melakukan pemberdayaan terhadap caleg perempuannya. Di samping itu, meskipun ada peningkatan politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, namun menurut responden politisi perempuan ini, legislator belum dianggap cukup mewakili kepentingan konstituen perempuan.

Sebagian politisi perempuan mengatakan kebijakan afirmatif sudah cukup efektif. Indikatornya adalah, pertama, semakin banyaknya perempuan yang menjadi anggota dewan. Kedua, kebijakan afirmatif telah berhasil mendorong partai untuk mencalonkan lebih banyak caleg perempuan. Menurut mereka, kebijakan afirmatif sudah

memberikan kesempatan kepada politisi perempuan dan giliran politisi perempuan untuk meningkatkan kualitasnya.

d. Perlu Tidaknya Kebijakan Afirmatif

Sebagian responden menyatakan bahwa kebijakan afirmatif diperlukan. Diantara mereka mengharapkan agar kebijakan afirmatif dilakukan dengan sistem zig zag. Sebagian lagi mengharapkan agar persyaratan 30 persen caleg perempuan ditingkatkan. Jawaban yang berbeda diajukan oleh beberapa responden lainnya. Mereka setuju bahwa kebijakan afirmatif tetap diperlukan sepanjang kesadaran politik masyarakat masih rendah. Satu orang responden menyatakan kebijakan afirmatif tidak diperlukan faktor penentu ada pada perempuan itu sendiri.

Semua responden dari kalangan non-parpol memandang kebijakan afirmatif tetap diperlukan. Satu pandangan meminta agar undang-undang menyaratkan 30 persen kuota yang sudah jadi di lembaga legislatif dan bukan lagi 30 persen calon anggota legislatif perempuan. Kalangan non-parpol lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Mereka setuju dengan kebijakan afirmatif asalkan sudah ada kapasitasnya perempuan sudah handal dan mampu untuk mewakili aspirasi perempuan dan mampu membantu penyelesaian persoalan-persoalan perempuan itu sendiri.

e. Kaderisasi Khusus untuk Perempuan

Sebagian besar dari responden parpol mengatakan bahwa partai mereka sudah mengadakan kaderisasi bagi perempuan partai. Persepsi mereka tentang kaderisasi sebagian besar belum mengarah pada konsep kaderisasi sebagai penempatan dan peningkatan kapasitas seorang politisi. Sebagian besar dari mereka mengartikan kaderisasi sebagai tempat berkumpulnya kelompok perempuan untuk melakukan sosialisasi, kegiatan sosial, dan kegiatan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan keterampilan menyulam, membuat kue, kursus kecantikan, siraman rohani, arisan, kegiatan lingkungan, pengajian, pelatihan menjahit, senam bersama, taman bacaan perempuan dan membuat pupuk organik. Sebagian responden mengartikan kaderisasi sebagai diskusi di antara kelompok perempuan untuk membahas berbagai persoalan diantaranya adalah membahas KDRT dan mendampingi

kader perempuan yang menghadapi masalah. Sebagian responden lainnya mengartikan kaderisasi sebagai pendidikan dan pelatihan kader perempuan yang dilakukan melalui departemen perempuan atau sejenisnya. Topik dari pelatihan tersebut lobi, berbicara di depan umum, kepemimpinan, dan berbagai macam pelatihan lain. Kaderisasi perempuan dipahami oleh responden lainnya sebagai kebijakan partai untuk merekrut semakin banyak perempuan untuk masuk ke dalam partainya. Diantara responden yang menyebutkan bahwa partai mereka telah melakukan kaderisasi untuk perempuan, ada beberapa responden yang menyampaikan bahwa kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh partai dilakukan dalam skala yang terbatas dan kurang berkesinambungan, karena partai memiliki masalah kesinambungan pendanaan untuk melakukan pendidikan politik.

Sebagian responden parpol mengatakan partai belum melakukan kaderisasi untuk perempuan. Partai baru dalam tahap untuk merencanakan saja namun belum terealisasi. Ada juga responden yang mengatakan bahwa partainya tidak melakukan kaderisasi yang khusus untuk perempuan oleh karena partainya tidak membedakan jenjang kader laki-laki dan perempuan. Walaupun ada kekhususan untuk perempuan, itu dilakukan dengan cara mengisi posisi-posisi tertentu dengan pengurus perempuan.

Kalangan responden non-parpol memberikan penilaian yang berbeda. Sebagian besar dari mereka menilai parpol belum melakukan kaderisasi khusus untuk perempuan. Hal ini diakibatkan karena dari awal partai memilih kader perempuan secara tidak selektif. Walaupun ada kaderisasi untuk perempuan, itu hanya dilakukan menjelang pemilu. Sekalipun demikian, sebagian kalangan non-parpol menilai ada parpol yang sudah melakukan kaderisasi khusus untuk perempuan.

f. Keaktifan kader perempuan (parpol/parlemen) memperjuangkan agenda kesetaraan keterwakilan perempuan (isu perempuan)

Kalangan parpol yang diwawancarai, sebagian besar mengatakan kader perempuan baik di parpol maupun di parlemen secara umum belum pernah memperjuangkan isu perempuan. Sebagian responden lainnya mengatakan kader perempuan sudah pernah menyuarakan isu perempuan. Pandangan lainnya yang muncul

adalah perempuan belum maksimal dalam menyuarakan isu perempuan. Ada juga yang responden yang mengatakan bahwa politisi perempuan sudah mengikuti kegiatan sosial.

Responden parpol yang mengatakan bahwa kader perempuan partai belum menyuarakan kesetaraan keterwakilan perempuan (isu perempuan) mengutarakan beberapa alasan. Pertama, belum ada pengaduan masyarakat ke partai tentang isu perempuan. Isu perempuan akan diperjuangkan kalau ada pengaduan dari masyarakat. Kedua, lemahnya akutabilitas dari para legislator perempuan dalam menyuarakan isu perempuan. Isu perempuan banyak terdengar ketika masa kampanye, namun isu tidak lagi terdengar pasca pemilu. Ketiga, terpilihnya perempuan sebagai legislator bukan karena ingin memperjuangkan kepentingan perempuan, namun karena memiliki massa. Keempat, belum pernah ada kerja sama antara kader partai perempuan untuk menyuarakan isu perempuan. Kalaupun ada perjuangan dari legislator perempuan, perjuangan itu cenderung merupakan perjuangan individu legislator perempuan. Kelima, sedikitnya jumlah legislator perempuan yang membuat perjuangan isu perempuan menjadi sangat terbatas. Keenam, lemahnya kualitas kader perempuan. Latar belakang keterlibatan perempuan di dunia politik tidak dimulai dengan proses-proses kaderisasi sejak awal sehingga belum banyak kader perempuan yang siap baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ketujuh, komitmen dan keberanian yang kurang dari politisi perempuan untuk menyuarakan isu perempuan. Politisi perempuan lebih sering mengadakan perempuan, tapi belum ada tindakan untuk melakukan pembelaan terhadap isu perempuan. Kedelapan, tidak adanya kerja sama yang baik antara partai dan wakil rakyat untuk memperjuangkan isu perempuan.

Ada satu responden parpol yang mengatakan bahwa kader perempuan sudah menyuarakan kepentingan perempuan. Yang bersangkutan mengatakan bahwa kader perempuan dari partainya, sudah menyuarakan kepentingan perempuan seperti masalah pendidikan. Di internal partai, kader pernah mendesak partai untuk mengakomodir perempuan dalam bidang struktur partai, yang kemudian mampu menciptakan bidang pemberdayaan perempuan partai.

Beberapa responden berpendapat bahwa kader perempuan sudah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Legislator perempuan pernah menangani isu tenaga kerja wanita, persolan ibu melahirkan, dan persoalan perempuan korban perceraian. Namun

kader perempuan partai dianggap belum aktif menyuarakan kepentingan perempuan dan sosialisasi kesadaran gender.

Dari responden kalangan non parpol, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kalangan kader perempuan partai belum menyuarakan isu perempuan. Beberapa responden dari kalangan non-parpol menyampaikan bahwa ada beberapa kader perempuan yang memiliki kapasitas untuk menyuarakan isu perempuan, namun masih dalam tataran kemampuan individu. Sebagian kecil responden mengatakan kader perempuan sudah mulai aktif untuk menyuarakan isu perempuan.

Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Pertama, kader partai terutama anggota dewan, sulit untuk ditemui. Kedua, kader perempuan yang direkrut sebagian besar belum dikenal kiprahnya oleh masyarakat. Mereka terpilih bukan karena kapasitas namun karena koneksi dengan pengurus partai. Ketiga, isu perempuan hanya muncul pada masa kampanye namun tidak terdengar lagi pada masa pasca pemilu. Keempat, kader perempuan belum memiliki kapasitas dan keberanian yang memadai untuk menyuarakan isu perempuan. Kelima, belum ada kerjasama antar kader perempuan untuk menyuarakan isu perempuan. Keenam, kader partai perempuan sering menolak untuk diwawancarai oleh media. Ketujuh, legislator perempuan masih kebingungan dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Kedelapan, anggota legislator perempuan tidak terproses melalui sistem kaderisasi yang baik. Kesembilan, kader perempuan belum memahami isu kesetaraan gender. Kesepuluh, kader perempuan terlalu tergantung kepada keputusan suami.

2.2.3 Keluarnya Perempuan dari Politik

a. Apakah yang menyebabkan aktivis perempuan parpol keluar dari politik?

Politisi perempuan yang ditanya tentang hal ini, menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab keluarnya perempuan dari partai politik. Faktor yang dominan adalah karena gagal dalam proses pencalegan. Faktor lainnya adalah sudah tidak diperbolehkan oleh suami, mendapat pekerjaan yang lebih produktif, masuk ke partai sekadar sambilan, dan tidak mendapatkan pembelajaran di partai.

- Memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan posisi perempuan di partai politik dan strategi untuk mendorong penguatan peran dan posisi perempuan di politik.

BAB III

KERANGKA MODEL STRATEGIS KADERISASI PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK

3.1 Kerangka Evolusi Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik

<div style="text-align: center;">Evolusi Komprehensif</div> <div style="text-align: center;">Agency</div>	Transformasi Ideologi	Gerakan/ Aksi Kolektif	Representasi	Kebijakan	Implementasi
Aktor/ Kapasitas Individual (<i>voice</i> : kapasitas pribadi, kemandirian dan power)	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program
Institusional (<i>system</i> / aturan partai)	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program
Kultural (<i>body role</i>)	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program
Struktural (kemandirian ekonomi)	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program	problem, kompleksitas, analisis, solusi, dan program

3.2. Problem Kaderisasi Perempuan Berdasarkan Agensinya

3.2.1 Aktor/ Kapasitas Individu

Perempuan terlibat dalam kegiatan politik lebih banyak berorientasi pada pengembangan kapasitas diri. Mereka merasa bisa bertambah wawasan, melatih dan mempraktikkan komunikasi, membina jejaring sosial, berlatih menghadapi tantangan, membentuk kepribadian yang kuat serta ingin mendobrak kerasnya politik patriarki. Hanya sebagian kecil perempuan yang memilih untuk terlibat dalam kehidupan politik setelah sebelumnya menjalani penguatan kapasitas melalui jenjang kaderisasi di organisasi massa (Ormas) atau partai politik sendiri. Kenyataan ini terungkap dari hasil *assessment* kaderisasi perempuan dalam parpol di Bali:

”Saya masuk partai untuk menambah wawasan, menambah banyak teman, pergaulan kita akan lebih luas. Kalau membutuhkan apa-apa, terutama yang dibutuhkan desa akan lebih mudah”

” Jiwa saya terpanggil, mendapat wawasan lebih, melatih kemampuan komunikasi, keluarga juga mendukung”

”Saya ingin membangun citra positif dimat masyarakat dapil saya, ingin menjadi perempuan yang mampu mendobrak kerasnya politik laki-laki di Bali”

3.2.2 Institusional/ Sistem atau Aturan Partai

Secara institusional baik sistem maupun aturan partai sebagaimana diakui oleh pimpinan partai politik yang diwawancara selalu menyatakan bahwa sudah ada pengkaderan dalam partai yang dilakukan secara berjenjang, Pengkaderan dilakukan secara umum baik untuk kader laki-laki maupun kader perempuan, tidak ada perbedaannya. Hal yang sama diungkapkan juga oleh sebagian besar kelompok legislator laki-laki dan kelompok legislator perempuan, bahwa secara umum ada pengkaderan dipartai yang dilakukan secara berjenjang.

Ketika pimpinan parpol maupun kelompok legislator partai ditanya tentang pola atau bentuk serta jenjang pengkaderan, sebagian besar menyatakan bahwa pengkaderan partai dilakukan dengan mengirim para kader mengikuti pelatihan/ workshop/ training atau diskusi tentang perkembangan politik yang biasanya dilakukan oleh pihak luar partai, dalam hal ini LSM yang konsern dalam bidang transformasi parpol (Selalu disebut IRI). Selain itu juga ada pembekalan yang dilakukan oleh DPP, Pembekalan ini dilakukan secara rutin dan berkala oleh partai tertentu. Sedangkan pengurus partai lain menyatakan bahwa pembekalan yang dilaksanakan DPP untuk kader perempuan berdasarkan kuota (biasanya dikirim 2 orang), dan sekarang sudah tidak pernah lagi. Tampak bahwa kaderisasi secara berjenjang yang dilakukan secara internal belum banyak dilakukan. Partai politik masih banyak bergantung pada mentoring untuk pemberdayaan perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berkompeten di luar parpol.

- Sistem Pemilu
- Besar kecilnya Distrik
- Sifat Daftar Calon yang diajukan Partai Politik kepada KPU
- Organisasi Partai Politik
- Sifat-sifat sistem Partai Politik

3.2.3 Budaya

Hal menarik yang berkaitan dengan hambatan perempuan untuk berkiprah dipangung politik adalah faktor adat budaya. Budaya patriarkhi, konsep purusa pradana yang sering dipersepsi oleh banyak orang sebagai hambatan jika perempuan terjun didunia yang biasanya dimonopoli oleh laki-laki ternyata tidak mutlak benar.

Sebagian besar dari kelompok kader perempuan berpendapat bahwa kalangan adat tidak menghalangi kader wanita terjun dalam dunia politik, paling tidak sudah membuka pintu, walaupun tidak bisa dikatakan mendorong. Dalam mendukung caleg-caleg yang maju didesa akan melihat kualitas dari caleg, tetapi diakui oleh kader biasanya tetap lebih condong ke laki-laki.

Hambatan adat terhadap kiprah perempuan didunia politik ini kemudian dimaknai oleh kader perempuan sebagai beban kerja adat yang menjadi kewajiban dari wanita di Bali. Kerja adat yang pada saat-saat tertentu memang menyita waktu, menjalankan peran domestik kader dirumah tangga, pengembangan karier profesionalnya dan kegiatan kader di parpol, mengharuskan kader perempuan partai di Bali harus bisa memanage waktu demikian rupa supaya semua berjalan baik. Padahal untuk menjadi kader partai yang profesional dan layak masuk nominasi caleg, kader harus aktif dalam kegiatan-kegiatan partai, yang menyita waktu.

Dapat dikatakan disini bahwa adat dipandang sebagai penghambat dalam arti waktu yang harus diluangkan oleh kader perempuan dalam melaksanakan kewajibannya *me-banjar*, tidak secara substantif menghambat perempuan untuk berkiprah dipolitik.

- Sifat Budaya Politik
- Agama yang Dominan
- Sikap Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan
- Keberadaan Peran Gender Non Tradisional

3.2.4 Struktural/ Kemandirian Ekonomi

Perempuan biasanya baru ikut terlibat dalam kegiatan partai politik bila sudah mandiri secara ekonomi. Banyak yang menjadikan alasan ekonomi untuk bisa membuat jaringan pertemanan, promosi usaha dan mengembangkan bisnis.

"Saya ingin mencari tantangan dipolitik sekaligus mengembangkan jaringan usaha"

"Membentuk pribadi yang kuat sekaligus menambah teman dan relasi bisnis saya"

Alasan terakhir mengapa perempuan tertarik dunia politik adalah untuk **kekuasaan** (senang memimpin, menjadi anggota legislatif sehingga bisa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan menikmati kekuasaan).

"Ada kepuasan batin karena terlibat dalam pengambilan kebijakan untuk publik".

Dengan demikian secara struktural diperlukan penguatan dan kematangan ekonomi perempuan sebelum mereka benar-benar menekuni kehidupan politik.

- Tingkat Pembangunan Ekonomi
- Tingkat Pendidikan Perempuan
- Banyak sedikitnya Perempuan yang Bekerja

3.3. Model Mentoring Berdasarkan Agensi dan Evolusinya

3.3.1 Aktor/ Kapasitas Individu

- a. Transformasi ideologi: pendidikan politik untuk kader partai
- b. Gerakan/ Aksi Kolektif: penyuluhan komunikasi politik dan jejaring sosial
- c. Keterwakilan: pelatihan strategi kampanye dan kemenangan pemilu
- d. Keterlibatan dalam Formulasi Kebijakan: workshop legal drafting
- e. Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan: pelatihan advokasi terhadap pelaksanaan kebijakan

3.3.2 Institusional/ Sistem atau Aturan Partai

- a. Transformasi Ideologi: Perluasan kebijakan afirmatif
- b. Gerakan/ Aksi Kolektif: desiminasi kebijakan afirmatif yg diperluas kepada Pemangku kepentingan terkait
- c. Keterwakilan: parpol punya komitmen untuk mengawal perluasan kebijakan

afirmatif plus untuk diperjuangkan di legislatif

- d. Keterlibatan dalam Formulasi Kebijakan: partai punya program legal drafting
- e. Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan: program pelatihan advokasi kebijakan oleh partai

3.3.3 Budaya

- a. Transformasi Ideologi: penyuluhan agama/ budaya patriarkhi yg sensitif gender
- b. Gerakan/ Aksi Kolektif: Pelatihan
- c. Keterwakilan
- d. Keterlibatan dalam Formulasi Kebijakan
- e. Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan

3.3.4 Struktural/ Kemandirian Ekonomi

- a. Transformasi Ideologi
- b. Gerakan/ Aksi Kolektif
- c. Keterwakilan
- d. Keterlibatan dalam Formulasi Kebijakan
- e. Keterlibatan dalam Implementasi Kebijakan

Wujud mentoring: penyuluhan, pelatihan (membuat rencana pemberdayaan perempuan selama 1 tahun), workshop

Mentoring adalah proses dimana orang-orang yang telah lebih dahulu trampil dan pengalaman dibidang tertentu menjadi *role-model* yang secara langsung mengajari, menyemangati, mendorong dan membimbing peserta untuk mencapai target ketrampilan dan kemampuan yang memadai untuk terjun dalam bidang usaha yang diminati peserta.

Beberapa training, workshop yang pernah diselenggarakan untuk Parpol maupun Legislatif di Bali

1. Peran Pemuda dalam Mendukung Partai dan Legislator
2. Manajemen dan Perencanaan Kampanye
3. Fundraising Training
4. Memperkuat Peran dan Fungsi Litbang Partai Politik
5. Penjaringan dan Penyaluran Aspirasi Konstituen
6. Membangun Partai Kader Profesional
7. Pelayanan Konstituen “Mengelola Kantor Konstituent ”
8. Pelatihan Tehnik Advokasi (Lobi dan Negosiasi) dan Merancang Rencana Aksi
9. Public Speaking Skill
10. Interpretasi Polling: Bagaimana Membaca Hasil Polling untuk Kepentingan Partai
11. Evaluasi Internal Partai Politik
12. Tipologi, Karakter dan Model Parpol Indonesia
13. Ideologi Parpol dan Personalisasi Parpol (Evaluasi Terhadap Nilai, Orientasi dan Arah Pergerakan Partai
14. Party ID dan Era Marketing Politik
15. Komunikasi Politik dan Strategi Penguatan Jaringan Serta Rekrutmen Politik.
16. Ormas, Parpol, dan Kantong Pencarian Anggota dan Kader Politik
17. Menjaga, Memberdayakan dan Mempromosikan Anggota Parpol
18. “Membangun Partai Kader Professional: Analisa Tantangan dan Peluang”.
19. Identifikasi Isu dan Masalah Sosial
20. Aspirasi Publik dan Pelayanan Konstituent

21. Tips: Berhubungan dengan Media dan Profesionalisme
22. Kepemimpinan
23. Memenuhi Janji Kampanye
24. Menyiapkan Agenda Legislatif
25. Penelitian dan Taktik Parlemen
26. Kebijakan Publik
27. Representasi
28. Fungsi Legislasi
29. Fungsi Pengawasan
30. Fungsi Penganggaran/Budgeting
31. Bentuk dan Ruang Lingkup Korupsi Beserta Studi Kasus dan Delik Hukumnya (Dalam Fungsi Anggaran dan Legislasi)
32. Bentuk dan Ruang Lingkup Korupsi Beserta Studi Kasus dan Delik Hukumnya (Dalam Fungsi Pengawasan dan Representasi)

